

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA PEMERINTAH NAGARI SUMANI
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM
REALISASI PEMBANGUNAN TERMINAL DI NAGARI SUMANI,
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

ADE WANDRA

04 193 013



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Ade Wandra (04193013), Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi : Konflik Kepentingan Antara Pemerintah Nagari Sumani Dengan Pemerintah Kabupaten Solok dalam Realisasi Pembangunan Terminal di Nagari Sumani, Kabupaten Solok.

Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok periode 2000-2005 untuk membangun terminal di Nagari Sumani, mengingat pentingnya kehadiran sebuah terminal disana, karena Sumani merupakan daerah yang strategis, yang menghubungkan wilayah Padang-Panjang dengan Kabupaten Solok. Keinginan ini disambut baik oleh Pemerintah Nagari Sumani, sehingga lahirlah kesepakatan untuk merealisasikan hal tersebut. Ditengah berjalannya pembangunan terminal ini, Pemerintah Kabupaten Solok tiba-tiba menghentikan proyek ini dan menyatakan pembangunan telah dalam tahap selesai dibangun bahkan sudah diresmikan. Disisi lain, Pemerintah Nagari Sumani memandang pembangunan terminal ini belum sepenuhnya terealisasi. Pihak Nagari Sumani menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah melalaikan kewajibannya dalam membangun terminal ini. Hal inilah yang menyebabkan adanya tuntutan-tuntutan pihak nagari pada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk segera menyelesaikan pembangunan terminal tersebut, yang mengidentifikasikan terjadinya konflik antar kedua lembaga pemerintahan lokal ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan berbagai permasalahan yang ada, yaitu kronologis konflik kepentingan yang terjadi antara pihak nagari sumani dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, dampak yang terjadi akibat adanya konflik ini, serta langkah-langkah resolatif yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan konflik ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tipe deskriptif. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin mendeskripsikan berbagai hasil penelitian yang didapat di lapangan. Peneliti mengandalkan wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data dilapangan serta dengan pengambilan dokumentasi sebagai bukti penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori elit. Kedua teori ini sangat relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Teori konflik dan teori elit sangat koheren dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini terjadi adanya konflik antara pemerintah nagari sumani dan pemerintah daerah kabupaten solok, yang indikasi tersebut peneliti dapatkan dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para elit di kedua Lembaga Pemerintahan Lokal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti adanya konflik yang terjadi antara Pemerintah Nagari Sumani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Tetapi konflik tersebut tidak mengandung unsur anarkhisme dan ancaman dari kedua pihak. Konflik yang terjadi masih dalam batas melakukan tuntutan, dialog, serta pernyataan kedua pihak yang menunjukkan kekecewaan dan saling klaim pembenaran terhadap cara pandang masing-masing dalam menyikapi realisasi pembangunan terminal ini. Sampai saat ini, terutama pihak Nagari Sumani terus melakukan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Solok segera memenuhi keinginan nagari, yang kemudian hal ini direspons dengan janji-janji lagi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Kata kunci : Konflik kepentingan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Pemerintahan Nagari lahir, nagari hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan aset nagari dikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagaimana diatur dalam Perda No. 13 Tahun 1983. Di Nagari Sumani, semua aset nagari pada awalnya dikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari, namun terminal belum ada di Nagari Sumani. Setelah Pemerintahan Nagari lahir, pengelolaan aset nagari menjadi wewenang dari Pemerintah Nagari, sedangkan lembaga Kerapatan Adat Nagari hanya menangani permasalahan dalam koridor adat. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah sesuai peluang yang ada dalam Undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Daerah (Perda No. 9 Tahun 2000) yang mengatur tentang Pemerintahan Nagari. Kemudian untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari secara teknis dilaksanakan dengan Perda Kabupaten dan Peraturan Nagari.

Harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten diatur kembali pemanfaatannya dengan memperhatikan kepentingan nagari. Harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh pihak lain, setelah masa pengelola berakhir dikembalikan kepada Nagari.¹Sehubungan dengan pihak lain dalam penjelasan Perda tidak dijelaskan apakah termasuk didalamnya Kerapatan Adat Nagari (KAN).

¹ Perda 11 dan 12 Perda No. 9 tahun 2000

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyalurkan sebagian kewenangannya ke Pemerintahan Nagari. Tujuan penyerahan sebagian kewenangan kepada Pemerintahan Nagari adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat nagari sekaligus dapat meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat. Namun penyerahan kewenangan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari tidaklah sama, artinya penyerahan kewenangan harus memperhatikan kemampuan nagari, sehingga tujuan untuk mewujudkan Otonomi Nagari sebagai subsistem Pemerintahan Kabupaten dapat tercapai dengan baik.

Dalam rangka memaksimalkan Otonomi Daerah, nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten di berikan kewenangan untuk meningkatkan dan menggali sumber daya yang ada pada wilayah nagari untuk menunjang sumber kekayaan nagari dan meningkatkan perekonomian rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Pemerintah Nagari Sumani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mempunyai rencana untuk membangun terminal di Nagari Sumani. Kedua Lembaga Pemerintahan lokal ini, berasumsi akan pentingnya kehadiran sebuah terminal di daerah Nagari Sumani ini, karena daerahnya sangat strategis, mengingat daerah ini merupakan jalur transportasi darat yang menghubungkan daerah Padang Panjang dan Solok.

Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Solok yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi dan Elfi Sahlan Ben, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok, mengadakan pertemuan dengan pihak Pemerintah Nagari Sumani untuk pembahasan mengenai pembangunan terminal di Nagari Sumani. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Nagari Sumani dan Pemerintah Daerah Kabupaten

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan lokal baik itu tingkat Kabupaten ataupun tingkat pemerintahan terendah yaitu Nagari harus ada koordinasi dan keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan serta dalam melakukan kesepakatan, karena berawal dari tidak adanya koordinasi yang baik, akan menimbulkan konflik-konflik yang pastinya akan merugikan.

Dalam penelitian ini, hal itulah yang terjadi antara Pemerintah Nagari Sumani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, konflik terjadi diantara kedua Lembaga Pemerintahan Lokal ini justru setelah adanya kesepakatan untuk melakukan pengadaan terminal di Nagari Sumani. Hal ini terjadi karena kesepakatan itu tidak diimbangi dengan keterbukaan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan kesepakatan itu.

Konflik merupakan gejala yang hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua konflik beraspek politik atau berimplikasi politik sehingga mekanisme pengaturannya tidak selalu melalui proses politik. Ketidakesepakatan yang terjadi antara dua pihak seringkali dapat diselesaikan oleh kedua pihak tersebut. Dalam kasus pembangunan terminal Sumani ini, mulanya bukanlah merupakan konflik politik, namun berkembang menjadi konflik politik yang ditandai dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak yang berkonflik yaitu pihak Nagari Sumani untuk meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Teori

- Agustino, Leo, 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Untirta Pers : Banten
- Basri, Faisal, 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta : PT. Erlangga
- Bottomore, T. B 2006. *Elit dan Masyarakat*. Akbar Tanjung Institute : Jakarta
- Fisher, Simon, dkk. Diterjemahkan oleh S. N Kalkasan Menska 1989. *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Dalam Bertindak*. ZED BOOKS. The British Council
- Poloma, Margareth, 2003. *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Pruitt, G. Dean. Jeffery Z. Rubin, Diterjemahkan oleh Helly. P Soecipto, 2004 *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rosyidi, Bakaruddin dkk, 2005. *Politik dan Pemerintahan Lokal*, Modul Kuliah, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Andalas : Padang
- Sarundjajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta : Jakarta
- Soekamto, Sardjono 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Surbakti, Ramlan 2000. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Varma, S. P. 2003. *Teori Politik Modern*. PT Raja Grafindo : Jakarta
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta